

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Devie C. Bitjoli, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Halmahera Utara.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir. Frans Manery
Jabatan : Bupati Halmahera Utara

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

IR. FRANS MANERY

Tobelo, Januari 2022
Pihak Pertama,

dr. DEVIE C. BITJOLI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196512061996022001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (PD)

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET
	1	2		3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah.	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah.	95%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah: 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan: 1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah. Rp. 15.569.500,- 1 Laporan 2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. Rp. 727.359.500,- 1 Laporan 3) Pelaksanaan Konsultasi Publik. Rp. 313.796.000,- 1 Laporan 4) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD. Rp. 195.022.000,- 1 Laporan 5) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Rp. 635.075.000,- 1 Laporan 6) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan. Rp. 820.710.000,- 1 Laporan 7) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Rp. 768.594.500,- 2 Dokumen 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah: 1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Rp. 55.087.500,- 1 Laporan 2) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD. Rp. 153.260.000,- 1 Laporan 3) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Rp. 238.720.000,- 1 Dokumen		

				3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah: 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota. 2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.	Rp. 175.464.500,- Rp. 577.675.500,-	1 Laporan 6 Laporan
		Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	90%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah: 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia: 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD). 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. 8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam):	Rp. 103.319.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 2.982.500,- Rp. 90.958.50,- Rp. 102.930.000,- Rp. 8.000.000,- Rp. 3.682.500,- Rp. 134.537.500,-	1 Laporan 4 PD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 13 PD 1 Laporan 1 Laporan

				1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Rp.	81.768.000,-	1 Laporan
				2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.	Rp.	4.000.000,-	5 PD
				3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.	Rp.	2.865.500,-	1 Laporan
				4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.	Rp.	88.283.500,-	1 Laporan
				5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Rp.	81.768.000,-	1 Laporan
				6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.	Rp.	2.800.000,-	4 PD
				7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.	Rp.	2.910.500,-	1 Laporan
				8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.	Rp.	83.425.000,-	1 Laporan
				3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan:			
				1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Rp.	104.962.500,-	1 Laporan
				2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.	Rp.	4.800.000,-	6 PD
				3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.	Rp.	4.224.000,-	1 Laporan
				4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.	Rp.	256.944.000,-	1 Laporan
				5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Rp.	104.342.500,-	1 Laporan

				6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	Rp. 8.000.000,-	17 Kecamatan
				7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Bidang Kewilayahan.	Rp. 2.982.500,-	1 Laporan
				8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.	Rp. 93.183.000,-	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77 (BB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah: 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor.	Rp. 23.573.500,- Rp. 899.500,- Rp. 899.500,- Rp. 899.500,- Rp. 899.500,- Rp. 23.772.000,- Rp. 4.036.500,- Rp. 4.789.949.611,- Rp. 13.565.500,- Rp. 8.638.500,- Rp. 41.977.000,- Rp. 20.998.000,-	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 16 Laporan 12 bin 1 Laporan 18 Laporan 47 Pasang 19 item

				2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Rp.	78.001.000,-	7 item
				3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Rp.	119.135.800,-	1 Tahun
				4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Rp.	60.625.000,-	1 Tahun
				5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Rp.	79.524.000,-	12 Bln
				6) Fasilitas Kunjungan Tamu.	Rp.	23.996.000,-	360 org/kali
				7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp.	166.320.000,-	46 OK
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:			
				1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Rp.	214.680.040,-	12 Bln
				2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp.	81.452.052,-	12 Bln
				3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Rp.	21.000.000,-	33 Kali
				4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp.	70.224.01,-	12 Bln
				6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:			
				1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Rp.	222.741.650,-	1 Tahun
				2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Rp.	4.500.000,-	1 Tahun
				3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Rp.	150.000.000,-	1 Paket
				4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Rp.	19.681.000,-	1 Paket

Pada Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengelola APBD sebesar Rp. 12.595.992.165,- untuk melaksanakan 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 62 (enam puluh dua) Sub Kegiatan.

Pihak Kedua



Pihak Pertama

